

Usulan-Usulan melawan hasutan kebencian dan diskriminasi

Daftar Isi

Pengantar dari Menteri Hukum	3
Rangkuman usulan	5
Usulan melawan hasutan kebencian/permusuhan	5
Meningkatkan perlindungan terhadap diskriminasi yang lebih luas	6
Cara mengajukan saran	8
Pemerintah ingin mendengar pendapat Anda	8
Pengajuan dapat dilakukan dari 25 Juni hingga 6 Agustus 2021	8
Anda dapat mengirimkan pengajuan melalui situs web Ruang Warga milik Kementerian .	8
Anda juga dapat mengirimkan pengajuan melalui email atau pos	8
Kerahasiaan dan informasi pribadi	8
Pertanyaan dan informasi tambahan	9
Masalah keamanan.....	10
Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda menerima ujaran atau perilaku kebencian?	10
Konteks dan Latar Belakang	11
Apa alasan Pemerintah melakukan ini?	11
Hak kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang dilindungi, asalkan tetap dalam batasan yang wajar.....	12
Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1993 mencantumkan dua ketentuan yang melarang penghasutan permusuhan.....	13
Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam hukum yang sekarang berlaku	15
Pemerintah menginginkan masukan untuk enam usulan	17
Apa tujuan dari usulan-usulan ini?	17
Seperti apa komunikasi yang dilakukan sejauh ini?	17
Pertimbangan Perjanjian Waitangi	18
Langkah selanjutnya	18
Dokumen ini berisi pertanyaan untuk masukan usulan	19
Terdapat lampiran yang membahas perubahan hukum secara lebih terperinci.....	19

Usulan yang terkait penghasutan kebencian	20
Menambahkan kelompok yang dilindungi oleh ketentuan penghasutan	20
Memperjelas perilaku yang dilarang oleh hukum dan memperberat konsekuensi dari pelanggaran hukum.....	22
Meningkatkan perlindungan dari diskriminasi secara umum	26
Bahasan terkait yang tidak menjadi bagian dokumen ini.....	29

Pengantar dari Menteri Hukum

Tēna koutou,

Masyarakat kita semakin kuat karena beragamnya orang yang menjadikan Aotearoa Selandia Baru sebagai rumah mereka.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1993 melarang ujaran yang menyulut konflik ras dan juga melarang diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan suatu aspek identitas mereka.

Mengikuti tinjauan dari Kementerian Hukum dan rekomendasi dari Royal Commission of Inquiry (Komisi Penyelidikan Kerajaan) mengenai serangan teroris di masjidain Christchurch pada 15 Maret 2019, Pemerintah mengusulkan beberapa perubahan untuk memperkuat dan memperjelas perlindungan yang ada. Pemerintah juga mengusulkan dua perubahan legislatif untuk ketentuan mengenai diskriminasi secara lebih luas. Dokumen ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan usulan-usulan ini.

Usulan ini membidik jenis komunikasi yang mencoba untuk menyebarkan dan menanamkan perasaan intoleransi, prasangka buruk, dan kebencian terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Semua orang diciptakan setara dan masyarakat kita terdiri dari orang-orang dengan berbagai aspek identitas berbeda. Hasutan kebencian terhadap suatu kelompok berdasarkan suatu ciri seperti etnis, agama, atau pilihan seksual adalah sebuah serangan terhadap nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman yang kita usung. Hasutan demikian tidak dapat diterima dan tidak memiliki tempat dalam masyarakat kita.

Kebebasan berekspresi adalah nilai penting yang dilindungi oleh Pemerintahan kami. Hal ini diabadikan dalam Undang-Undang Bill of Rights (Deklarasi Hak Asasi) Selandia Baru tahun 1990, bersama dengan kebebasan dari diskriminasi. Tujuan dari usulan-usulan ini adalah untuk melindungi hak-hak tersebut dengan lebih baik, termasuk hak orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian agar dapat mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Undang-Undang Bill of Rights mengizinkan pembatasan hak secara wajar yang diseimbangkan dengan hak dan kepentingan lainnya.

Usulan ini mencoba untuk menerapkan ketentuan penghasutan secara lebih luas untuk kelompok-kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian, seperti kelompok keagamaan dan komunitas pelangi. Usulan ini tidak akan mengurangi ambang batas pembedaan ujaran atau mencegah adanya debat publik mengenai isu-isu penting.

Pemerintah ingin mengembangkan kohesi sosial yang lebih baik di Aotearoa sehingga bisa menjadi tempat yang semua orang dapat merasa diterima. Bagian penting dari usaha ini adalah melawan perilaku dan bahasa yang dapat menyakiti warga kita. Keberagaman kita akan membuat Aotearoa lebih kuat. Komunitas yang berempati satu sama lain dan mendorong terbentuknya persatuan akan terus memperkuat masyarakat kita. Menjadi korban kebencian akan menyebabkan orang-orang merasa tidak aman dan tidak diterima di tempat yang seharusnya menjadi rumah mereka. Hal tersebut juga dapat menyebabkan lebih banyak diskriminasi dan kekerasan. Saya berharap Anda mau berbagi pendapat Anda mengenai usulan-usulan ini dengan kami.

Ngā mihi

Hon. Kris Faafoi
Menteri Hukum

Rangkuman usulan

Pemerintah telah secara umum prinsip menyetujui semua usulan berikut. Persetujuan secara prinsip berarti menyetujui usulan-usulan secara umum tetapi bukan rincian perubahan khusus. Artinya Pemerintah berpendapat bahwa perubahan adalah sesuatu yang baik, tetapi mereka ingin mendengar pendapat lain sebelum mengambil keputusan akhir dan mengusulkan kepada badan legislatif untuk melakukan perubahan hukum. Usulan-usulan ini dapat berubah berdasarkan masukan yang diterima.

Deskripsi terperinci dari usulan ini dan alasan pengusulannya tersedia pada halaman 17 pada dokumen ini.

Usulan ini hanyalah bagian kecil dari tanggapan Pemerintah terhadap rekomendasi dari Komisi Penyelidikan Kerajaan mengenai serangan teroris di masjidain Christchurch pada 15 Maret 2019. Halaman 25 berisi daftar beberapa upaya lain Pemerintah dalam memahami dan menangani tindak kejahatan kebencian dan ujaran kebencian. Anda dapat menemukan lebih banyak informasi mengenai hal ini dan upaya lainnya sebagai tanggapan rekomendasi di sini: <https://dpmc.govt.nz/our-programmes/national-security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain>

Usulan melawan hasutan kebencian/permusuhan

Menambahkan kelompok yang dilindungi oleh ketentuan penghasutan

- **Usulan Satu:** Mengubah bahasa dalam ketentuan penghasutan pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1993 sehingga melindungi lebih banyak kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.
 - Saat ini, sekelompok orang mendapat perlindungan Undang-Undang jika kebencian disulut secara khusus terhadap mereka berdasarkan warna kulit, ras, etnis, atau suku bangsa
 - Dengan usulan ini, lebih banyak kelompok akan mendapat perlindungan hukum jika kebencian disulut berdasarkan suatu ciri yang mereka miliki. Hal ini mungkin mencakup sebagian atau semua alasan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Alasan-alasan ini disebutkan dalam bagian 21 dalam Undang-Undang yang dilampirkan dalam Lampiran Satu.

Memperjelas perilaku yang dilarang oleh hukum dan memperberat konsekuensi dari pelanggaran hukum

- **Usulan Dua:** Mengganti ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1993 dengan pelanggaran pidana dari Undang-Undang Pidana 1961 yang lebih jelas dan efektif.
 - Perubahan hukum dilakukan agar seseorang yang secara sengaja menghasut, menyulut, mempertahankan dan menormalkan kebencian terhadap suatu kelompok berdasarkan ciri yang disebutkan dalam Usulan Satu akan dianggap melakukan pelanggaran hukum jika mereka melakukannya dengan mengancam, berbuat kasar, atau menghina, termasuk dengan menyulut kekerasan
 - Orang tersebut dianggap melanggar hukum terlepas dari cara mereka melakukan ancaman, kekerasan, dan penghinaan. Tidak akan menjadi masalah jika hal-hal tersebut disampaikan secara lisan, dalam tulisan (berbentuk gambar atau kata-kata) atau secara online (seperti melalui media sosial, melalui email, atau melalui pesan digital).
- **Usulan Tiga:** Memperberat hukuman untuk pelanggaran pidana sehingga mencerminkan keseriusannya. Hal ini akan mengubah hukuman dari ancaman penjara hingga tiga bulan atau denda hingga \$7.000 menjadi ancaman hingga tiga tahun penjara atau denda hingga \$50.000.
- **Usulan Empat:** Mengubah bahasa terkait penghasutan dalam ketentuan perdata sehingga setara dengan perubahan pada ketentuan pidana.

Meningkatkan perlindungan terhadap diskriminasi yang lebih luas

- **Usulan Lima:** Mengubah ketentuan perdata sehingga "hasutan diskriminasi" menjadi suatu pelanggaran hukum.
 - Peraturan akan berubah sehingga seseorang dilarang menghasut atau memengaruhi orang lain untuk mendiskriminasi suatu kelompok berdasarkan ciri yang dilindungi oleh peraturan tersebut. Seseorang yang mendorong orang lain untuk memberi suatu kelompok yang dilindungi perlakuan yang buruk atau berbeda dari lainnya akan dianggap melakukan pelanggaran hukum. Hal ini

berarti seseorang dapat mengajukan keluhan kepada komisi Hak Asasi Manusia.

- **Usulan Enam:** Menambahkan alasan-alasan diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk memperjelas bahwa kelompok transgender, gender berbeda, dan interseks dilindungi dari diskriminasi.
 - Saat ini, diskriminasi berdasarkan gender adalah sesuatu yang melanggar hukum. Pemerintah berpendapat bahwa ini sudah melindungi dari diskriminasi berdasar identitas gender atau ekspresi gender, atau karakteristik seksual seseorang, atau status interseks, tetapi peraturannya dapat dibuat lebih jelas. Peraturannya akan diubah untuk secara khusus meliputi aspek-aspek gender dan seks tersebut.

Cara mengajukan saran

Pemerintah ingin mendengar pendapat Anda

Pemerintah menginginkan masukan dari sebanyak mungkin kelompok dan orang-orang mengenai usulan dalam dokumen ini. Masukan dan saran perbaikan Anda akan memengaruhi keputusan akhir Pemerintah.

Dokumen diskusi ini hanya mengenai ketentuan penghasutan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Informasi mengenai kegiatan Pemerintah lainnya yang berkaitan tersedia di halaman 25.

Pengajuan dapat dilakukan dari 25 Juni hingga 6 Agustus 2021

Penerimaan masukan dibuka dari 25 Juni 2021 hingga 6 Agustus 2021.

Jika Pemerintah setuju untuk melakukan perubahan pada hukum, Anda juga akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan untuk plakat amandemen dalam proses komite terpilih.

Anda dapat mengirimkan pengajuan melalui situs web Ruang Warga milik Kementerian

Anda dapat mengakses Ruang Warga di <https://consultations.justice.govt.nz>. Situs ini memudahkan penyampaian masukan untuk usulan-usulan.

Anda juga dapat mengirimkan pengajuan melalui email atau pos

Anda dapat mengirimkan email pengajuan ke humanrights@justice.govt.nz.

Anda dapat mengirimkan pengajuan tertulis ke Human Rights, Ministry of Justice, SX10088, Wellington.

Kerahasiaan dan informasi pribadi

Harap dipahami bahwa masukan Anda dapat menjadi subjek permohonan informasi dari Kementerian Hukum berdasar Official Information Act (Undang-Undang Informasi Resmi) 1982. Informasi pribadi dapat dilindungi oleh Undang-Undang, termasuk nama dan alamat Anda. Jika Anda tidak menginginkan informasi yang Anda berikan untuk disebarluaskan, mohon

sampaikan secara jelas beserta alasan Anda. Contohnya, Anda mungkin menginginkan sebagian informasi dirahasiakan karena merupakan informasi pribadi yang sensitif. Kementerian Hukum akan mempertimbangkan pendapat Anda saat menanggapi permintaan tersebut.

Privacy Act (Undang-Undang Privasi) 2020 mengatur cara Kementerian mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan membuka informasi pribadi Anda dan informasi yang Anda berikan. Anda berhak mengakses dan mengoreksi informasi pribadi.

Kementerian akan secara proaktif merilis rangkuman dari pengajuan masukan yang diterima. Rangkuman tidak akan memuat informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu.

Pertanyaan dan informasi tambahan

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi tambahan mengenai peninjauan atau proses pengajuan, Anda dapat mengunjungi situs web kami:

www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination, atau menghubungi kami melalui email: humanrights@justice.govt.nz.

Pemerintah ingin mengurangi atau menghilangkan sebanyak mungkin hambatan dalam pembuatan pengajuan, tetapi harus dipahami bahwa mungkin masih terdapat beberapa hambatan yang Anda temui dalam membagikan pendapat Anda. Jika pengajuan melalui Ruang Warga, email, atau pos tidak dapat Anda lakukan, hubungi kami melalui cara yang telah kami sebutkan dan kami akan membantu Anda melakukan pengajuan masukan.

Masalah keamanan

Dokumen diskusi ini meminta pendapat Anda mengenai perubahan peraturan mengenai hasutan kebencian. Meski kami menerima pengajuan berisi pengalaman orang-orang, kami tidak menyarankan Anda menyertakan informasi sensitif atau pribadi yang ingin Anda rahasiakan dan juga meminta agar Anda tidak menyebutkan individu yang dapat dikenali.

Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda menerima ujaran atau perilaku kebencian?

Keamanan Anda adalah sesuatu yang penting bagi kami. Jika isi dokumen ini menempatkan Anda dalam bahaya fisik atau mental, penting bagi Anda untuk mengetahui tempat untuk mendapatkan informasi atau bantuan.

- Hubungi pihak kepolisian jika merasa diri Anda terancam bahaya. Dalam keadaan darurat, hubungi 111. Jika Anda tidak sedang berada dalam bahaya langsung, hubungi 105.
- Untuk informasi mengenai bantuan dari Komisi Hak Asasi Manusia, lihat <https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/>
 - o Untuk informasi mengenai gangguan rasial lihat <https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/>
- Untuk perilaku kekerasan online, lihat <https://www.netsafe.org.nz/>
- Jika ingin berbicara mengenai perasaan Anda dengan seseorang, Anda dapat menelepon atau mengirimkan pesan ke 1737.

Konteks dan Latar Belakang

Apa alasan Pemerintah melakukan ini?

Apa itu ujaran kebencian?

'Ujaran kebencian' adalah sebuah istilah umum yang tidak digunakan dalam hukum Aotearoa Selandia Baru. Definisi umumnya adalah ujaran yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan suatu ciri yang dimiliki, misalnya etnis, agama, atau seksualitas.

Usulan-usulan dalam dokumen ini secara khusus terkait dengan ujaran yang menghasut kebencian terhadap suatu kelompok

Usulan ini dan juga ketentuan yang sekarang digunakan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berfokus pada ujaran yang 'menghasut kebencian' orang-orang terhadap suatu kelompok. Ujaran yang 'menghasut kebencian' adalah ujaran kasar atau mengancam yang menyulut permusuhan terhadap suatu kelompok (bukan diarahkan kepada satu orang) berdasarkan suatu ciri yang mereka miliki.

Ujaran yang menghasut kebencian menyebabkan kerugian yang signifikan

Pemerintah menganggap ujaran yang menghasut kebencian sebagai ancaman terhadap kesetaraan, keberagaman, rasa saling hormat, dan keadilan. Hasutan kebencian menyebabkan kerugian signifikan, membawa dampak negatif untuk komunitas yang menjadi sasaran, dan akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kekerasan. Hasutan kebencian merusak masyarakat kita dengan menyebabkan munculnya rasa bermusuhan dan menghambat inklusi sosial, menyebarluaskan rasa saling tidak percaya dan perpecahan di antara komunitas-komunitas kita.

Perjanjian hak asasi manusia internasional mengharuskan adanya peraturan melawan ujaran kebencian

Penghasutan kebencian adalah sesuatu yang dilarang oleh perjanjian hak asasi manusia internasional. Aotearoa adalah anggota Kongres Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD), yang mengharuskan negara anggota mengundangkan perlawanan terhadap ujaran kebencian rasial, yang telah dipenuhi oleh Aotearoa.

Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) juga mengharuskan adanya hukum yang menentang dukungan terhadap kebencian akan bangsa, ras, atau agama yang berakhir dengan hasutan kepada orang-orang untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, maupun kekerasan.

Pemerintah ingin meningkatkan perlindungan dari hasutan kebencian

Melindungi orang-orang dari hasutan kebencian akan mendorong terbentuknya komunitas yang aman serta memperkuat pesan bahwa hasutan kebencian adalah perilaku yang buruk dan merusak di mata masyarakat. Hal tersebut sudah dilarang oleh hukum perdata dan pidana, namun peraturannya masih dapat ditingkatkan.

Rincian usulan yang dipertimbangkan oleh Pemerintah tersedia di halaman 17.

Pemerintah ingin mendengar pendapat Anda mengenai usulan-usulan tersebut

Dokumen diskusi ini bertujuan untuk menguji usulan-usulan tersebut. Dokumen ini menyampaikan informasi mengenai usulan-usulan dan mencari masukan dan saran untuk peningkatan.

Pemerintah mengetahui bahwa terdapat ketertarikan tinggi publik dalam upaya ini dan pentingnya penyampaian pendapat Anda.

Hak kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang dilindungi, asalkan tetap dalam batasan yang wajar

Bagian 14 dari Undang-Undang Bill of Rights Selandia Baru tahun 1990 melindungi kebebasan berekspresi. Hal tersebut meliputi kebebasan mencari, mendapatkan, dan membagikan informasi dan pendapat dalam jenis dan bentuk apa pun. Hak kebebasan berekspresi dikukuhkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan oleh ICCPR.

Seperti semua hak dan kebebasan dalam Undang-undang Bill of Rights, hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi oleh hukum dengan cara yang dibenarkan dalam masyarakat demokratis dan bebas. Terdapat beberapa aturan di Aotearoa yang dibenarkan dalam pembatasan kebebasan berekspresi. Aturan-aturan ini berusaha menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan hak-hak dan kepentingan lainnya. Sebagai contoh, aturan klasifikasi film membatasi kebebasan berekspresi pencipta dan penonton untuk menegakkan hak-hak anak dan anggota publik lainnya dan melindungi mereka dari konten yang berbahaya bagi mereka atau melanggar norma-norma dalam masyarakat.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1993 mencantumkan dua ketentuan yang melarang penghasutan permusuhan

Ketentuan penghasutan terdiri dari ketentuan perdata dan pidana

Sistem hukum perdata meliputi perselisihan antar individu, organisasi, dan dalam beberapa kasus, antara pemerintahan lokal atau pusat. Perselisihan dapat disebabkan oleh kontrak, hutang-piutang, atau tindakan seperti kelalaian. Tuntutan perdata memberikan penggantian atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan suatu pihak terhadap pihak lain dan juga mencegah berulangnya kerugian tersebut.

Sistem hukum pidana diarahkan untuk mencegah perbuatan yang dianggap salah dan merusak oleh masyarakat dengan cara menghukum, mencegah, dan kecaman publik. Penegakan hukum atas kasus kriminal umumnya dilakukan oleh Negara atas nama masyarakat, terhadap individu.

Ketentuan perdata penghasutan terhadap perselisihan ras

Ketentuan perdata dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Bagian 61) menyebutkan bahwa tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum adalah menggunakan, menerbitkan, menyiarkan, atau menyebarluaskan material tertulis atau menggunakan kata-kata yang:

1. mengancam, kasar, atau merendahkan, dan
2. mungkin menyulut permusuhan atau merendahkan kelompok apa pun berdasarkan warna kulit, ras, etnis, atau suku bangsa.

Siapa pun dapat melaporkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komisi) ketika merasa seseorang telah melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum oleh bagian 61 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Siapa pun dapat melaporkan kepada Komisi mengenai ujaran apa pun, meski mereka bukan anggota kelompok yang menjadi tujuan.

Peran Komisi adalah berusaha menyelesaikan laporan yang disampaikan. Komisi dapat menyediakan informasi, dukungan pemecahan masalah, dan mediasi. Mediasi tidaklah diwajibkan. Jika mediasi ditolak atau gagal menyelesaikan masalah, pelapor dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinjauan Hak Asasi Manusia (Pengadilan). Pengadilan dapat melakukan sidang dan memutuskan kasus berdasarkan bukti yang ada.

Jika Pengadilan menemukan terjadinya pelanggaran bagian 61, maka Pengadilan berhak menyelesaikan dengan cara yang dianggap sesuai. Hal ini termasuk menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran, menerbitkan perintah larangan terhadap terdakwa

untuk mencegah berlanjut atau berulangnya pelanggaran, dan memerintahkan ganti rugi hingga sebesar \$350.000.

Teks lengkap bagian 61 dimuat dalam Lampiran Satu.

Ketentuan pidana terhadap hasutan perselisihan ras

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (bagian 131) menyebutkan bahwa tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum pidana adalah menghasut ketidakharmonisan ras dengan menerbitkan, menyiarkan, atau menyebar luaskan materi tertulis atau kata-kata yang bersifat berikut ini:

1. mengancam, kasar, atau menghina,
2. yang mungkin menyulut rasa permusuhan atau niat buruk terhadap, atau merendahkan dan mengolok-olok kelompok mana pun berdasarkan warna kulit, ras, atau etnis, atau suku bangsa, dan
3. dimaksudkan untuk menyulut rasa permusuhan, niat buruk, merendahkan, atau mengolok-olok.

Pelanggaran ini diancam hukuman hingga tiga bulan penjara, atau denda hingga sebesar \$7.000. Seseorang yang didakwa menggunakan bagian 131 akan menjalani pengadilan di Pengadilan Distrik untuk memutuskan apakah mereka bersalah atau tidak.

Teks lengkap bagian 131 dimuat dalam Lampiran Satu.

Ketentuan penghasutan ini menjadi batasan yang dibenarkan untuk kebebasan berekspresi

Secara bersamaan, kedua ketentuan penghasutan membentuk pendekatan seimbang yang mempertimbangkan keseriusan ujaran kebencian dan berat hukuman yang diberikan. Hukuman yang ada mencerminkan bahwa dengan sengaja mendorong munculnya rasa permusuhan di antara orang-orang (bagian 131) lebih serius dibanding ujaran tanpa niatan tersebut (bagian 61).

Ketentuan penghasutan yang ada saat ini membidik ujaran yang berusaha meyakinkan orang-orang bahwa masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok etnis tidak akan dapat berfungsi dan berusaha memunculkan permusuhan antara satu sama lain. Peraturan yang ada melarang hasutan demikian karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokratis Aotearoa Selandia Baru. Sikap tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis karena berdasar pada pemikiran bahwa dikarenakan suatu ciri, seperti etnis, agama, atau seksualitas, maka beberapa kelompok orang boleh dianggap lebih rendah dari yang lainnya. Sikap demikian dapat memunculkan kepercayaan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki hak yang sama, harus diperlakukan berbeda, dan dikucilkan.

Ujaran yang menghasut kebencian dapat berdampak pelanggaran hak asasi manusia kelompok yang menjadi sasaran, seperti hak kesetaraan, kebebasan berekspresi, kebebasan

bepergian, dan kebebasan untuk menjalin hubungan. Hal ini dikarenakan perilaku tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan menyebabkan orang-orang merasa tidak aman, dan pada akhirnya mencegah mereka dari berpartisipasi dalam kehidupan publik dan diikutsertakan sebagai bagian dari masyarakat. Maka dari itu, membatasi ujaran-ujaran demikian melalui keseimbangan yang tepat antara hukum pidana dan perdata menjadi dibutuhkan.

Terdapat hukum lain yang melarang jenis lain ujaran kebencian

Terdapat hukum lain yang melindungi individu dari berbagai jenis ujaran kebencian yang berbeda. Sebagai contoh, Summary Offences Act (Undang-Undang Pelanggaran Ringan) 1981, Harmful Digital Communications Act (Undang-Undang Komunikasi Digital Berbahaya) 2015, Harassment Act (Undang-Undang Pelecehan) 1997, dan Films, Videos, and Publications Classifications Act (Undang-Undang Klasifikasi Film, Video, dan Publikasi) 1993 dapat diterapkan pada beberapa jenis ujaran kebencian.

Dokumen diskusi ini hanya mengenai ketentuan penghasutan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Informasi mengenai kegiatan Pemerintah lainnya yang berkaitan tersedia di halaman 25.

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam hukum yang sekarang berlaku

Beberapa masalah pada ketentuan yang ada diidentifikasi dalam tinjauan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan dalam Laporan Komisi Penyelidikan Kerajaan mengenai serangan teroris di masjidain Christchurch pada 15 Maret 2019.

Kata-kata yang digunakan dalam ketentuan pidana masih kurang jelas

Komisi Kerajaan menemukan bahwa kata-kata dalam ketentuan pidana tidak memberikan standard yang cukup jelas mengenai jenis-jenis perilaku yang sebaiknya dipidanakan. Kata-kata yang digunakan saat ini dinyatakan terlalu berbelit-belit dan direkomendasikan untuk melakukan penyusunan ulang kata-kata sehingga hanya ujaran ekstrim yang ditangkap. Komisi Kerajaan juga mencatat masalah serupa dengan susunan kata dalam ketentuan perdata, meskipun fokus utama rekomendasi mereka adalah untuk ketentuan pidana. Komisi Kerajaan mencatat bahwa ketentuan pidana yang ada sudah kedaluarsa dan, tidak seperti ketentuan perdata, tidak meliputi komunikasi elektronik.

Ujaran yang menghasut kebencian berdampak pada lebih banyak kelompok dari yang saat ini dilindungi oleh ketentuan yang ada

Tinjauan Kementerian dan Laporan Komisi Kerajaan menemukan bahwa cakupan kedua ketentuan tersebut terlalu sempit dalam hal kelompok yang dilindungi karena hanya mengaitkan ras, suku bangsa, etnis, dan warna kulit. Hal-hal tersebut hanyalah empat dari tiga belas "larangan alasan diskriminasi" yang diurutkan di bagian 21 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Larangan alasan diskriminasi berarti diskriminasi berdasarkan ciri yang disebutkan adalah melanggar hukum, terkecuali jika memenuhi satu atau lebih pengecualian terbatas. Teks lengkap bagian 21 dimuat dalam Lampiran Satu.

Ini adalah sebuah kekosongan yang disebabkan oleh belum disertakannya beberapa kelompok yang dilindungi dari diskriminasi dalam perlindungan dari ujaran yang menghasut kebencian. Meski demikian, kelompok-kelompok lain tetap dapat menjadi korban ujaran kebencian.

Hukuman pelanggaran ketentuan pidana terlalu ringan

Tinjauan Kementerian dan Laporan Komisi Kerajaan menyimpulkan bahwa hukuman tiga bulan penjara untuk pelanggaran pidana cenderung ringan dan tidak mencerminkan betapa seriusnya penghasutan kebencian dengan sengaja.

Pemerintah menginginkan masukan untuk enam usulan

Apa tujuan dari usulan-usulan ini?

Usulan-usulan ini berusaha menanggapi masalah pada hukum yang berlaku saat ini, seperti telah disebutkan sebelumnya. Perubahan ini bertujuan membuat perlindungan dari ujaran yang menghasut kebencian lebih jelas dan lebih efektif. Beberapa perubahan tersebut merupakan rekomendasi Komisi Kerajaan. Pemerintah telah menyetujui secara prinsip untuk melakukan perubahan yang diusulkan. Persetujuan secara prinsip berarti menyetujui usulan-usulan secara umum tetapi bukan rincian perubahan khusus.

Perubahan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat atas perlindungan dari ujaran yang menghasut kebencian dapat dipenuhi. Pemerintah beranggapan bahwa usulan-usulan baru dapat menemukan keseimbangan yang tepat mengenai kapan ujaran kebencian sebaiknya dilarang dan, dalam beberapa kasus, dipidanakan.

Perubahan hukum ini akan membantu kami memenuhi kewajiban hak asasi manusia kami di bawah ICCPR dan sejalan dengan rekomendasi yang dibuat oleh organisasi hak asasi manusia internasional, seperti yang disampaikan Dewan Hak Asasi Manusia pada Tinjauan Universal Berkala (Universal Periodic Review, UPR) Selandia Baru pada Januari 2019, oleh Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Wanita pada Juli 2018, dan oleh Komite PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada 2017.

Pemerintah ingin mendengar dan mempertimbangkan pendapat Anda mengenai usulan-usulan ini sebelum mengambil keputusan akhir.

Seperti apa komunikasi yang dilakukan sejauh ini?

Komunikasi terkait ujaran kebencian

Di tahun 2019, Kementerian Hukum dan Komisi Hak Asasi Manusia bertemu dengan kelompok-kelompok yang paling mungkin menjadi sasaran ujaran kebencian untuk lebih memahami pengalaman dan pandangan mereka. Komunikasi tersebut menghasilkan informasi untuk usulan dalam dokumen ini.

Komunikasi terkait laporan Komisi Penyelidikan Kerajaan

Komisi Penyelidikan Kerajaan mengenai Serangan Teroris di Masjid Christchurch membuka laporan mereka kepada publik pada 8 Desember 2020. Mengikuti pembukaan Laporan, Hon. Andrew Little, Menteri Pemimpin Koordinasi untuk Komisi Kerajaan dan Hon. Priyanca

Radhakrishnan, Menteri Keberagaman, Inklusi, dan Komunitas Etnis, beserta pejabat dari berbagai agensi pemerintah menyelenggarakan 33 hui publik, khususnya dengan komunitas-komunitas Muslim dan umumnya dengan komunitas-komunitas keagamaan dan etnis di seluruh Aotearoa sepanjang Januari dan Februari 2021.

Hui ini diselenggarakan untuk membantu Pemerintah memahami kekhawatiran utama dan prioritas dari tiap komunitas, menjawab pertanyaan mengenai laporan dan penerapannya, memberikan masukan mengenai inisiatif yang dilakukan, dan mendiskusikan cara komunitas-komunitas dapat terus berhubungan dan bekerja sama dengan Pemerintah dan badan pemerintah di masa mendatang. Banyak permasalahan yang dibahas dalam hui tersebut. Salah satu tema yang muncul adalah insiden, ujaran, dan kejahatan kebencian yang dialami oleh banyak anggota komunitas-komunitas kita, dan bahwa perombakan legislatif adalah alat penting menuju perubahan.

Pertimbangan Perjanjian Waitangi

Perjanjian Waitangi adalah sesuatu yang relevan untuk ketentuan penghasutan dan perlindungan dari diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan usulan-usulan dalam dokumen ini. Māori adalah salah satu kelompok yang mengalami ujaran kebencian dan saat ini dilindungi oleh ketentuan penghasutan dengan dasar "ras" atau "etnis". Usulan dalam dokumen ini berusaha untuk melindungi kelompok etnis, termasuk Māori, dengan lebih baik dari ujaran-ujaran yang menghasut kebencian. Khususnya, perlindungan akan diperkuat sehingga Māori akan dilindungi oleh alasan larangan diskriminasi lainnya, misalnya sehubungan dengan takatāpui.

Langkah selanjutnya

Setelah menganalisis pengajuan masukan yang diterima, Pemerintah akan mempertimbangkan jika akan melakukan perubahan seperti yang diusulkan atau melakukan perubahan berdasarkan masukan, atau mengambil tindakan lainnya.

Rangkuman masukan yang diajukan akan disediakan dan informasi mengenai keputusan akhir Pemerintah diharapkan untuk dibuka bagi publik di tahun ini.

Dokumen ini berisi pertanyaan untuk masukan usulan

Bagian berikut meliputi keenam usulan dan berisi pertanyaan khusus yang terkait pada tiap usulan. Tiga pertanyaan yang dapat Anda gunakan sebagai petunjuk bagi masukan yang akan Anda ajukan untuk tiap usulan adalah:

- Apakah Anda menemukan adanya ancaman atau konsekuensi tak terduga yang muncul akibat usulan ini, jika ada, apa yang Anda temukan?
- Apakah ada peningkatan yang dapat diterapkan untuk usulan ini?
- Apakah usulan ini menunjukkan lebih banyak masalah Perjanjian Waitangi di luar yang telah dibahas dalam dokumen ini?

Terdapat lampiran yang membahas perubahan hukum secara lebih terperinci

Usulan-usulan dijelaskan secara umum dalam dokumen berikut. Namun, usulan ini juga membahas permasalahan mengenai arti kehukuman khusus secara kata per kata dan bagaimana perilaku tertentu digambarkan dengan kata-kata. Jika Anda tertarik membaca secara lebih terperinci mengenai perubahan bahasa yang diusulkan bagi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Anda dapat membacanya dalam Lampiran Dua di bagian akhir dokumen ini.

Usulan yang terkait penghasutan kebencian

Menambahkan kelompok yang dilindungi oleh ketentuan penghasutan

1

Usulan Satu: Mengubah bahasa dalam ketentuan penghasutan sehingga melindungi lebih banyak kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian

Apa hukum yang berlaku saat ini?

Ketentuan penghasutan hanya berlaku untuk ujaran yang menasar suatu kelompok berdasarkan "warna kulit, ras, atau etnis, atau suku bangsa".

Apa permasalahan dari hukum yang berlaku saat ini?

Terdapat lebih banyak kelompok di luar "warna kulit, ras, atau etnis, atau suku bangsa" yang menjadi sasaran ujaran kebencian, termasuk kelompok yang berdasar agama, gender, seksualitas, dan disabilitas. Pemerintah berpendapat bahwa hasutan kebencian karena alasan-alasan ini adalah salah dan pantas untuk diproses secara pidana atau perdata. Komisi Kerajaan juga mempertimbangkan agama sebaiknya disertakan dalam ketentuan.

Apa tujuan dari usulan ini?

Usulan ini akan mengubah kata-kata dalam kedua ketentuan penghasutan sehingga berlaku bagi lebih banyak kelompok yang dilindungi dari diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Keduanya tetap berlaku untuk kelompok berdasar "warna kulit, ras, atau etnis, atau suku bangsa" tetapi juga akan meliputi ujaran yang menghasut kebencian atau permusuhan terhadap kelompok lainnya yang dilindungi dari diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Kelompok yang menerima ujaran kebencian berdasarkan alasan lain, termasuk seks, gender (termasuk identitas gender), agama, disabilitas, atau orientasi seksual. Pemerintah merasa bahwa kelompok-kelompok lain yang menjadi korban ujaran kebencian juga dapat dilindungi oleh hukum, dan tertarik mendengar pendapat mengenai kelompok-kelompok mana yang sebaiknya dilindungi oleh perubahan ini.

Dalam praktiknya, ini berarti jika seseorang mengatakan atau menuliskan sesuatu yang memenuhi kriteria hukum dan menysar suatu kelompok berdasar salah satu ciri yang dilindungi ia dapat dilaporkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia atau Kepolisian. Komisi atau Kepolisian kemudian memutuskan tindakan apa yang akan diambil.

Masukan Usulan Satu

- Apakah Anda menyetujui bahwa mengembangkan ketentuan penghasutan dengan cara ini dapat melindungi kelompok-kelompok tersebut dengan lebih baik?
 - o Mengapa atau mengapa tidak?
- Menurut Anda, kelompok-kelompok mana yang sebaiknya dilindungi oleh perubahan ini?
- Menurut Anda, apakah ada kelompok korban ujaran kebencian yang luput dari perlindungan yang diberikan perubahan ini?

Memperjelas perilaku yang dilarang oleh hukum dan memperberat konsekuensi dari pelanggaran hukum

2

Usulan Dua: Menggantikan ketentuan pidana yang digunakan dengan pelanggaran pidana baru dari Undang-Undang pidana yang lebih jelas dan efektif

Apa hukum yang berlaku saat ini?

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam dokumen ini (pada halaman 12), terdapat tindak pidana secara sengaja "menghasut ketidakharmonisan rasial" di Aotearoa dalam bagian 131 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Apa permasalahan dari hukum yang berlaku saat ini?

Ketentuan ini berbelit-belit dan sulit dipahami. Terdapat penggunaan empat istilah, yaitu "permusuhan", "niat buruk", "merendahkan" dan "mengolok-olok" yang memiliki pengertian luas dan juga berpotensi untuk tumpang-tindih. Terdapat juga penggunaan kata "meluapkan" dengan cara yang tidak umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Komisi Kerajaan juga menyebutkan bahwa ketentuan ini tidak seperti ketentuan perdata, tidak mencakup komunikasi elektronik.

Apa tujuan dari usulan ini?

Usulan ini akan menciptakan ketentuan pidana baru dalam Undang-Undang Pidana yang lebih jelas dan mudah dipahami dibanding bagian 131 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Dalam usulan ini, istilah "permusuhan", "niat buruk", "merendahkan" dan "mengolok-olok" akan digantikan oleh "kebencian". Penggunaan kata ini disarankan oleh Komisi Kerajaan yang mengakui bahwa perubahan akan mengerucutkan arti kata-kata dibandingkan yang digunakan saat ini.

Rincian kata-kata ketentuan ini akan ditetapkan setelah konsultasi. Dirundingkan juga apakah akan menggunakan istilah "menghasut", "menyulut" atau istilah lainnya dengan arti serupa.

Usulan ini akan melarang ujaran yang mempertahankan dan menormalkan kebencian sebagai tambahan untuk ujaran yang menghasut atau menyulut kebencian. Hal ini akan memastikan bahwa komunikasi yang mungkin ditujukan pada orang-orang yang mungkin sudah memiliki pandangan ekstrem akan dianggap melanggar hukum.

Usulan ini akan mencakup semua metode penyampaian ujaran (termasuk secara elektronik).

Usulan ini akan melindungi kebebasan berekspresi dengan memastikan bahwa hanya ujaran kebencian ekstrem dengan niat menyebabkan orang lain mengembangkan atau menguatkan kebencian terhadap suatu kelompok saja yang akan dipidanakan.

Pelanggaran baru ini akan ditempatkan dalam Undang-Undang Pidana 1961 untuk menunjukkan bahwa ini adalah pelanggaran berat.

Susunan kata dalam usulan ini termasuk pengembangan kelompok yang dilindungi. Untuk pertanyaan kelompok-kelompok mana yang sebaiknya dilindungi oleh ketentuan penghasutan, lihat Usulan Satu.

Masukan Usulan Dua

- Apakah Anda setuju mengubah susunan kata ketentuan pidana dengan cara ini akan membuatnya lebih jelas dan mudah dipahami?
 - o Mengapa atau mengapa tidak?
- Menurut Anda, apakah usulan ini dapat menggambarkan jenis perilaku yang seharusnya melanggar hukum di bawah peraturan baru?

3

Usulan Tiga: Memperberat hukuman pelanggaran pidana hingga tiga tahun penjara atau denda hingga sebesar \$50.000 untuk mencerminkan beratnya pelanggaran

Apa hukum yang berlaku saat ini?

Penalti yang berlaku (yang berarti hukuman) jika seseorang diputuskan bersalah atas penghasutan pidana adalah maksimal tiga bulan penjara atau denda maksimal sebesar \$7.000.

Apa permasalahan dari hukum yang berlaku saat ini?

Berdasarkan penilaian seberapa serius perilaku yang menjadi cakupan ketentuan pidana baru, dan perbandingan dengan pelanggaran pidana lainnya, Pemerintah merasa bahwa hukuman yang ada saat ini terlalu ringan. Komisi Kerajaan juga menyatakan bahwa hukuman yang ada terlalu ringan dan mengusulkan penambahan waktu hukuman maksimum hingga tiga tahun penjara.

Apa tujuan dari usulan ini?

Usulan ini akan menambahkan hukuman maksimum untuk pelanggaran pidana baru hingga tiga tahun penjara, atau denda hingga sebesar \$50.000.

Karena pelanggaran ini menangkap perilaku yang berusaha untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat, Pemerintah merasa bahwa hukuman yang diberikan seharusnya lebih berat daripada hukuman untuk kebencian yang diarahkan pada individu.

Beberapa pelanggaran dan hukuman yang sebanding adalah:

- pelanggaran perilaku tidak tertib dalam bagian 3 Undang-Undang Pelanggaran Ringan 1981 memiliki hukuman maksimum tiga bulan penjara dan denda sebesar \$2.000
- pelanggaran komunikasi digital berbahaya dalam bagian 22 Undang-Undang Komunikasi Digital Berbahaya 2015 memiliki hukuman maksimum dua tahun penjara atau denda sebesar \$50.000
- Pelanggaran ancaman pembunuhan atau menyebabkan luka parah dalam bagian 306 Undang-Undang Pidana 1961 memiliki hukuman maksimum tujuh tahun penjara
- Pelanggaran pembuatan atau penyebar luasan publikasi tidak pantas dalam bagian 124 Undang-Undang Klasifikasi Film, Video, dan Publikasi 1993 memiliki hukuman maksimum 14 tahun penjara.

Masukan Usulan Tiga

- Menurut Anda apakah hukuman ini sudah mencerminkan beratnya tindak pidana dengan sesuai?
 - o Mengapa atau mengapa tidak?
- Jika Anda tidak setuju, tindak pidana apa yang sesuai sebagai perbandingan?

4 *Usulan Empat: Mengubah bahasa ketentuan perdata untuk menyesuaikan dengan perubahan pada ketentuan pidana*

Apa hukum yang berlaku saat ini?

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (lihat halaman 11), bagian 61 Undang-Undang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan perdata yang menyatakan bahwa menghasut permusuhan atau tindak merendahkan terhadap suatu kelompok berdasar "warna kulit, ras, atau etnis, atau suku bangsa" adalah suatu pelanggaran hukum.

Apa permasalahan dari hukum yang berlaku saat ini?

Jika Usulan Dua diterapkan, akan muncul ketidakkonsistenan antara susunan kata pada ketentuan pidana dan perdata. Ini akan menyebabkan ketidakjelasan mengenai perbedaan antara "menghasut atau menyulut kebencian" dan "meluapkan permusuhan atau menyebabkan penghinaan". Hal ini menjadikan tidak jelas apakah sebuah tuntutan bisa diajukan menggunakan ketentuan perdata mengenai penghasutan kebencian. Menyebabkan adanya perbedaan antara ketentuan pidana dan perdata ini bukanlah sesuatu yang dimaksudkan.

Apa tujuan dari usulan ini?

Usulan ini akan mengubah susunan kata ketentuan perdata penghasutan untuk menyertakan "penghasutan/penyulut, mempertahankan atau menormalkan kebencian" di samping kata-kata yang sudah ada.

Harus terdapat konsistensi antara ketentuan perdata dan pidana mengenai jenis perilaku yang dilarang. Penyertaan kata "kebencian" juga diinginkan dalam ketentuan perdata sehingga tanggung jawab perdata dikenakan untuk komunikasi yang paling berat dan merusak.

Usulan ini tidak melakukan perubahan lain pada ketentuan perdata. Komisi Kerajaan menyatakan bahwa susunan kata ketentuan perdata memunculkan masalah penegakan karena ketidakjelasan.

Ketentuan ini mungkin memerlukan perubahan lain untuk memperjelas perilaku apa saja yang menjadi cakupannya selain penghasutan kebencian.

Masukan Usulan Empat

- Apakah Anda mendukung perubahan bahasa pada bagian 61?
 - o Mengapa atau mengapa tidak?
- Menurut Anda apakah bagian lain susunan kata ketentuan perdata juga harus diubah?

Meningkatkan perlindungan dari diskriminasi secara umum

Pemerintah telah mengidentifikasi dua masalah hukum terkait diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang ingin dibahas. Pemerintah juga ingin mendengar pendapat Anda mengenai hal ini.

5 *Usulan Lima: Mengubah ketentuan perdata sehingga "penghasutan untuk mendiskriminasi" menjadi melanggar hukum*

Apa hukum yang berlaku saat ini?

Bagian 61 tidak menyebutkan sama sekali "penghasutan untuk mendiskriminasi".

Apa permasalahan dari hukum yang berlaku saat ini?

Di bawah ICCPR, "Semua dorongan kebencian atas suku bangsa, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk mendiskriminasi, memusuhi, atau tindak kekerasan dilarang oleh hukum." Aotearoa telah bergabung dalam ICCPR, namun hasutan untuk mendiskriminasi belum dilarang dalam hukum Aotearoa. Perubahan yang diusulkan akan memungkinkan Aotearoa untuk menyelaraskan hukum kami dengan ICCPR.

Apa tujuan dari usulan ini?

Berdasarkan usulan ini, tindakan penghasutan orang lain untuk mendiskriminasi anggota kelompok yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang juga dilindungi oleh ketentuan penghasutan kebencian, akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Diskriminasi berarti memperlakukan seseorang dengan lebih buruk dari orang lain karena sesuatu pada diri mereka, seperti etnis, atau gender. Seperti Usulan Empat, ini akan mengubah susunan kata ketentuan perdata.

Masukan Usulan Lima

- Apakah Anda mendukung penyertaan pelarangan hasutan mendiskriminasi dalam bagian 61?
 - o Mengapa atau mengapa tidak?

6

Usulan Enam: Menambahkan alasan-alasan diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk memperjelas bahwa kelompok transgender, gender berbeda, dan interseks dilindungi dari diskriminasi

Apa hukum yang berlaku saat ini?

Daftar larangan alasan diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia meliputi "seks, yang meliputi kehamilan dan kelahiran" dan "Orientasi seksual, yang berarti orientasi heteroseksual, homoseksual, lesbian, atau biseksual".

Apa permasalahan dari hukum yang berlaku saat ini?

Pemerintah menganggap ketentuan yang ada saat ini kurang menjelaskan bahwa orang-orang transseksual, gender berbeda, dan interseks juga dilindungi dari diskriminasi. Pemerintah dan Komisi Hak Asasi Manusia menganggap bahwa alasan "seks" yang sudah ada meliputi kelompok-kelompok ini, namun "seks" dan "gender" adalah konsep yang berbeda dan hukumnya dapat diperjelas.

Apa tujuan dari usulan ini?

Usulan ini akan mengubah larangan alasan diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk memperjelas perlindungan untuk kalangan transseksual, gender berbeda, dan interseks. Hal ini dilakukan dengan mengubah kata-kata alasan "seks" untuk menyertakan "ciri seksual atau status interseks" dan menambahkan alasan "gender termasuk ekspresi gender dan identitas gender". Hal tersebut akan menjelaskan bahwa diskriminasi karena alasan gender, ekspresi gender, identitas gender, ciri seksual atau status interseks adalah ilegal. Kami menyadari adanya kata-kata yang dapat digunakan seperti "variasi ciri seksual" atau "non-biner" yang dapat menggantikan gender berbeda.

Perjanjian Waitangi khususnya memiliki relevansi untuk usulan ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa perubahan ini memastikan bahwa takatāpui dan identitas gender khusus pada kebudayaan lainnya terlindungi dari diskriminasi. Takatāpui adalah istilah tradisional yang berarti 'pasangan intim sejenis.' Telah diperbarui untuk menerima semua Māori dengan identitas gender dan seksualitas berbeda seperti whakawāhine, tangata ira tāne, lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer.

Usulan ini tidak terkait langsung dengan ketentuan penghasutan kebencian. Namun, Usulan Satu dapat menghasilkan keputusan bahwa ketentuan penghasutan kebencian dapat diluaskan untuk melindungi kalangan transgender, gender berbeda, dan interseks dari ujaran yang menghasut kebencian.

Komunikasi dari proposal ini utamanya bertujuan memastikan bahasa yang tepat digunakan di bagian 21 Undang-Undang, karena Pemerintah menganggap ini adalah klarifikasi status quo dan bukan perubahan fundamental hukum yang berlaku.

Masukan Usulan Enam

- Apakah Anda merasa istilah ini sudah tepat?
- Menurut Anda, apakah usulan ini sudah cukup meliputi kelompok-kelompok yang sebaiknya dilindungi dari diskriminasi di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia?
- Apakah Anda merasa bahwa usulan ini sudah melindungi dengan tepat identitas gender yang khusus dari tiap budaya, termasuk takatāpui?

Bahasan terkait yang tidak menjadi bagian dokumen ini

Dokumen diskusi ini berfokus pada aspek khusus yang menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah yang lebih luas.

Pemerintah menjalankan beberapa pekerjaan sebagai tanggapan rekomendasi Komisi Kerajaan. Semua upaya ini dimulai sebelum adanya laporan Komisi Kerajaan. Termasuk di dalamnya:

- memperkuat kemampuan Komisi Hak Asasi Manusia untuk menanggapi ujaran kebencian, rasisme, dan diskriminasi
- Pekerjaan Kepolisian untuk secara akurat mengenali, mencatat, melaporkan, dan menanggapi tindak pidana terkait kebencian
- Pekerjaan Kementerian Hukum terkait tindak pidana kebencian
- upaya melawan ekstremisme dan terorisme
- perubahan definisi tidak pantas dalam Undang-Undang Klasifikasi Film, Video, dan Publikasi
- pendirian Kementerian Komunitas Etnis untuk memperbaiki peraturan terkait komunitas etnis
- upaya membangun kohesi sosial
- mengembangkan Rencana Tindakan Nasional Melawan Rasisme, dan
- upaya memperkuat ketahanan terhadap penyebaran informasi yang salah.

